

**Laporan Kerja**  
**Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Ke Meksiko**  
**Meksiko City, 3-9 Maret 2016**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pada tanggal 3 Maret-9 Maret 2016, delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) Meksiko melaksanakan kunjungan bilateral ke Meksiko City.

**B. Dasar Pengiriman Delegasi**

Pengiriman delegasi GKSB didasarkan atas Surat Keputusan Ketua DPR....(Mohon diisi)

**C. Susunan Delegasi**

Susunan delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) Meksiko adalah sebagai berikut:

1. Djoko Udjiyanto, Ketua Delegasi GKSB DPR RI, Fraksi Partai Demokrat, Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi Informatika, Intelijen).
2. Hendrawan Supratikno, Wakil Ketua GKSB Meksiko, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komisi XI (Keuangan dan Perbankan)
3. Arteria Dahlan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, komisi II (Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu).
4. Saiful Bahri Ruray, Fraksi Partai Golongan Karya, Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan).
5. Daniel Mutaqien Syafiuddin, Fraksi Partai Golongan Karya, Komisi V (Infrastruktur dan perhubungan).
6. Roberth Rouw, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
7. Wihadi Wijanto, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan).
8. Hang Ali Saputra Syah Pahan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
9. Arzeti Bilbina Setyawan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Komisi VIII (Agama dan Sosial).

10. Ansory Siregar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)

11. Achmad Mustaqim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Komisi VIII (Agama dan Sosial)

#### D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi GKSB BKSAP DPR RI ke Republik Meksiko antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antarpemerintah dengan Parlemen Meksiko. Peningkatan kerja sama ini selanjutnya dapat diwujudkan salah satunya dengan upaya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai landasan terbentuknya hubungan kerja sama yang lebih formal antara DPR dengan Parlemen di Meksiko, mengingat jauh sebelumnya Parlemen Meksiko telah mengusulkan peningkatan kerjasama parlemen melalui MoU Parlemen RI-Meksiko.
- 2) Untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Mempererat hubungan diplomatik kedua negara melalui jalur diplomasi kedua *parliament-to-parliament* pasca-63 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
- 3) Untuk memfasilitasi beragam *pending matters* yang muncul dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia - Meksiko.
- 4) Untuk mempererat tali persahabatan serta saling mendorong upaya peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara (antarpemerintah, antarpemerintah, antarbisnis, dan antarmasyarakat) di bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan.

#### E. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebelum melakukan kunjungan, delegasi GKSB Meksiko melaksanakan rapat teknis dan rapat pendalaman substansi materi. Rapat delegasi GKSB Meksiko dilaksanakan pada:

1. Rapat teknis tanggal
2. Rapat substansi

3. Mohon diteruskan

## **II. Isi Laporan**

## Pendahuluan

**Meksiko** (bahasa Meksiko: *Estados Unidos Mexicanos*) adalah sebuah negara yang terletak di daratan Amerika Utara yang paling selatan. Meksiko merupakan salah satu negara bekas jajahan Spanyol di benua Amerika. Nama resmi negara Meksiko adalah *Estados Unidos Mexicanos*. Ibu kotanya adalah Meksiko City.

Meksiko terletak antara 15 derajat LU-33 derajat LU dan 88 derajat BB-118 derajat BB sehingga sangat dipengaruhi oleh iklim tropis oseanik. Luas wilayah negara Meksiko adalah 1.958.201 km persegi. Bentuk Pemerintahannya adalah republik, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden. Meksiko terdiri dari 31 negara bagian dan 1 distrik federal. Meksiko memiliki Kongres dengan sistem bikameral. Parlemen Tinggi (*Upper Chamber*) disebut *Camara de Senadores* atau *Senado* (Senat). Parlemen Rendah (*Lower House*) disebut juga *Camara de Diputados* (*Chamber of Deputies*).

Hubungan diplomatik Meksiko dengan Indonesia terjalin sejak tahun 1953. Tahun 2016 menandai 63 tahun hubungan kerjasama bilateral. Pada tahap awal hubungan bilateral kedua negara, hubungan diplomatik Indonesia-Meksiko dibuka dengan penandatanganan *Joint Declaration* di Washington DC tanggal 6 April 1953.

Saat ini hubungan diplomatik kedua negara berkembang dan semakin meluas. Sejak tahun 1961 hingga tahun 2014 tercatat sekitar 23 perjanjian bilateral yang telah disepakati kedua negara. Perjanjian terakhir yang disepakati adalah Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, yang ditandatangani Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 14 April 2014.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral menuju kemitraan yang komprehensif. Untuk itu, dibentuk Kelompok Persahabatan Parlemen (*Grupo Amistad Parlamentaria/GAP*) Meksiko – Indonesia pada Oktober 2013. Lebih jauh, Parlemen Meksiko mengusulkan peningkatan kerjasama parlemen dengan menuangkan dalam MoU Kerjasama Parlemen RI-Meksiko.

Neraca perdagangan kedua negara mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan perdagangan Kementerian Perdagangan, total perdagangan kedua negara pada 2015 mencapai USD 930.167,5. Indonesia mengalami surplus neraca

perdagangan senilai USD 560.419,6 (Ekspor: USD 745.293,5 dan Impor: USD 184.874,0).<sup>1</sup>

Selain itu, kedua negara juga telah membuat prioritas penyelesaian *Plan of Action (POA)* RI-Meksiko 2015-2019, serta membuat berbagai perjanjian/MoU kerjasama bilateral, di antaranya: MoU Kerjasama Olahraga dan MoU Kerjasama Perikanan; MoU Ketenagakerjaan; *technical arrangement* Kerjasama Penelitian Pertanian; *plan of action* sebagai implementasi MoU Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Narkotika BNN dan Kejagung Meksiko; dan masih banyak lagi.

---

<sup>1</sup> Lihat <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=421>

**Pertemuan dengan Dubes LBBP RI untuk Meksiko H.E. Yusra Khan**  
**Kedubes RI, Minggu 6 Maret 2016**

Duta Besar Yusra Khan memperkenalkan staf KBRI yang menghadiri pertemuan KBRI dengan delegasi GKSB Meksiko. Pejabat dan staf KBRI Meksiko City yang hadir adalah:

1. Dubes Yusra Khan
2. M. Syarif Alatas
3. Febby Fahrani
4. Christian Pangaribuan
5. Juriani Nurhayati
6. Rendra Kusumawardhana
7. Vicke Yan Pramudhie
8. Muhamad Roi
9. Banny Ramadhani
10. Wilson J. Sitompul
11. Charles P. Pasaribu
12. Pontianus Dedy. P
13. Septhiramun A. Adellina
14. Octa Kusuma Nugraha

Djoko Ujianto sebagai Ketua Delegasi GKSB Meksiko memperkenalkan delegasi serta sekretaris delegasi dan tenaga ahli BKSAP. Dalam pertemuan ini, Dubes Yusra Khan secara resmi menyambut kedatangan delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI yang dipimpin oleh Djoko Udjianto. Dubes Yusra Khan memberikan gambaran dan tinjauan situasi dan kondisi kekinian Meksiko sebagai bekal informasi bagi delegasi GKSB Meksiko bertemu dengan para pemangku kepentingan di Meksiko.

Dalam pendahuluan paparannya, Dubes Yusra Khan menjelaskan bahwa wilayah kerja KBRI Meksiko City adalah Meksiko, Republik Guatemala, Republik El-Salvador, dan Republik Belize. Di wilayah kerja tersebut, KBRI Meksiko City melakukan beragam kegiatan dan kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dubes Yusra Khan melanjutkan paparan situasi politik terkini Meksiko. Meksiko adalah negara demokratis yang terdiri dari 33 negara bagian dengan nama resmi Estados Unidos Mexicanos (the United State of Mexico/ Republik Meksiko Serikat). Enrique Peña Nieto adalah Presiden terpilih Meksiko. Ia adalah anggota Partai Revolusi Institucional (Institutional Revolutionary Party/ PRI) dan mantan gubernur Negara Bagian Meksiko dari tahun 2005 hingga tahun 2011.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, Meksiko sudah terlibat dalam perdagangan bebas sejak 1994 tatkala Meksiko tergabung dalam North Atlantic Free Trade Area (NAFTA), sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara di Atlantik Utara yang mencoba untuk menurunkan tarif dan hambatan dalam perdagangan. Saat ini Meksiko bersama dengan 10 lembaga dan 46 negara (regional maupun bilateral) tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas. Indonesia dan Meksiko tergabung dalam keanggotaan APEC, G-20, MIKTA, FIALA (Asia dan Amerika), dan terakhir jika Indonesia jadi tergabung dalam TPP. Di pihak Meksiko sendiri, Trans Pacific Partnership (TPP) yang dikomandani Amerika Serikat masih menjadi perdebatan di kalangan pembuat kebijakan. Pangkal perdebatan adalah kepentingan nasional Meksiko dapat terwadahi dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Selain itu, Meksiko bersama dengan Kolombia, Peru, dan Chile membentuk *Pacific alliance*. Perkumpulan ini adalah semacam integrasi regional yang berusaha menciptakan integrasi jasa, modal, investasi, dan perpindahan orang di keempat negara tersebut.

Di kawasan Amerika Tengah dan Latin, Meksiko adalah negara *emerging economy*. Di kawasan Meksiko Tengah, terdapat pusat-pusat pembangunan otomotif, penerbangan, dan obat-obatan. Meksiko membangun Maciladora sebagai pusat pengembangan industri. Pemerintah Meksiko telah menjalin kerjasama dengan pemerintah AS agar perakitan industri otomotif dan penerbangan di kawasan ini diberlakukan bebas pajak.

Duta Besar juga menjelaskan kondisi tiga negara lainnya di wilayah kerja KBRI Meksiko City (Guatemala, El-Salvador, dan Belize). Guatemala adalah negara maju dalam bidang tekstil di kawasan. Banyak pengusaha di negara ini adalah investor gula di Brazil. El-Salvador adalah negara yang menyerap produk-produk Indonesia terutama

aki mobil. Negara ini dikuasai oleh investasi Amerika Serikat dalam ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, Belize adalah negara berdaulat baru (*commonwealth*). Urusan kredensial masih diurus di London. Negara baru ini mengandalkan pariwisata sebagai andalan negaranya. Karena keindahannya salah satu teluk di negara ini dibeli oleh Leonardo Di Caprio. Dalam pada itu, Indonesia juga mempunyai tiga konsul kehormatan (*honorary council*) di tiga wilayah: Guadalajara, Montereaux, dan Honduras.

Selama kepemimpinan Yusra Khan di KBRI Meksiko, terdapat tujuh puluh acara yang dihelat oleh KBRI Meksiko yang meliputi perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan, kuliner, pendidikan, dan politik. Kerja KBRI menggenjot *comprehensive partnership* dan *plan of action* dengan Meksiko. Dibandingkan dengan Jepang dan Korea, Indonesia ketinggalan dalam investasi. Jepang memiliki 806 investasi di Meksiko, sementara Korea memiliki 1305 bentuk investasi di Meksiko (di antaranya LG dan Samsung).

Pertemuan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan delegasi GKSB Meksiko. Djoko Ujianto selaku ketua delegasi memulai dengan pertanyaan dengan memaparkan beberapa fakta kondisi di tanah air dengan kondisi di Meksiko. Kesehatan postur APBN menjadi tantangan Indonesia. Karena selama ini, APBN kita disandera berbagai hal-hal yang bersifat elementer: 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan. Sementara anggaran alutsista masih 1,5% dari PDB. Dalam era pemerintahan Jokowi, diharapkan semua elemen bangsa menyelaraskan dengan visi Jokowi Nawa Cita. Dengan itu kita perlu memikirkan satu loncatan strategis untuk hidup berkejahteraan.

Djoko Ujianto melanjutkan paparan dengan kayanya Indonesia akan sumber daya alam. Indonesia memproduksi 4 juta ton CPO, tebu 3,6 juta ton. Melihat data tersebut, Indonesia adalah produsen terbesar CPO dunia serta produsen karet terbesar dunia (USD 800 juta). Dengan melihat cita-cita bangsa swasembada gula maka kita perlu reinvestasi tebu dalam produksi gula kita. Dalam konteks bilateral Meksiko, KBRI Meksiko City perlu memperluas implementasi kerjasama dengan Meksiko. Misalnya: Meksiko mempunyai perjanjian pertahanan dengan Cina dan Jerman. Perlu dibuka kemungkinan kerjasama alutsista antara PT Pindad dengan pemerintah Meksiko. KBRI



Meksiko City perlu juga memfasilitasi alat-alat kesehatan yang diproduksi perusahaan dalam negeri untuk diedarkan di Meksiko. Dalam hal pariwisata, Indonesia perlu memikirkan kembali strategi *tourist marketing* agar turis Meksiko banyak berkunjung ke Indonesia.

Wihadi Wijanto, mengemukakan ketertarikannya akan diplomasi budaya melalui kegiatan festival film Indonesia di Meksiko. Festival film Indonesia di Meksiko akan membuka pangsa pasar Meksiko mengingat potensi film, televisi, dan sinetron di Meksiko cukup tinggi. Wihadi menanyakan kepada Dubes Yusra Khan kesiapan Meksiko terkait dengan perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) yang telah ditandatangani Meksiko. Selain itu, Wihadi juga menanyakan penanganan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Meksiko.

Dalam pandangan Ahmad Mustakim, Meksiko dan Indonesia terletak di jalur rawan bencana. Ia mencermati masalah kebencanaan di Indonesia dan Meksiko. Ia membandingkan kedua negara: Indonesia mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi dalam mitigasi bencana alam. Sedangkan Meksiko mendirikan *Protection Civil* sebagai lembaga tinggi yang diisi oleh lintas kementerian dan lembaga. Ia mencatat Meksiko mempunyai manajemen aset yang baik. Karena perhitungan aset yang berjalan baik di Meksiko, lembaga internasional seperti Bank Dunia dapat masuk mengatasi pendanaan bencana. Ia mengajukan saran agar pemerintah RI dapat mengambil *best-practice* penanggulangan bencana dari Meksiko untuk optimalisasi program pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*). Di samping itu, Ahmad Mustakim menanyakan kepada Dubes bagaimana penanganan trafficking di Meksiko.

Arteria Dahlan mengemukakan sejumlah pertanyaan: pada pemerintahan terdahulu, Pertamina pernah menandatangani kesepakatan dengan mitranya dari Meksiko Cemex. Ia ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tindak lanjut kesepakatan dan persetujuan antara dua perusahaan minyak pelat merah tersebut? Kerjasama kedua perusahaan minyak negara tersebut perlu ditindaklanjuti mengingat pentingnya kedua negara sebagai emerging economy. Dalam pandangannya, perikanan dan pertanian adalah dua andalan Indonesia yang dapat didistribusikan ke Meksiko sebagai

barang ekspor utama. Arteria Dahlan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberlakukan bebas visa bagi turis Meksiko, kini saatnya Duta Besar RI untuk Meksiko dapat melakukan peninjauan pemberlakuan bebas visa bagi turis Indonesia yang akan mengunjungi Meksiko mengingat ketentuan tersebut adalah kesepakatan yang telah dicapai antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan menteri Luar Negeri Meksiko.

Daniel Mutaqien Syafiuddin mempertanyakan kepada Dubes Yusra Khan bagaimana pola hubungan MIKTA yang telah berjalan saat ini. Investasi sangat mengandalkan keamanan, apakah keamanan di Meksiko mempengaruhi investasi asing? Ia juga menanyakan bagaimana tindak lanjut pameran investasi yang pernah dilaksanakan di Meksiko.

Arzeti Bilbina menyampaikan pendapat bahwa pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) harus disosialisasikan sejak usia sekolah dini agar menjadi perilaku keseharian setelah anak-anak menjadi dewasa. Bagaimana sosialisasi pengurangan risiko bencana dipraktikkan Meksiko? Sebagai praktisi mode dan busana, saya tertarik merekomendasikan pameran busana dihelat di Meksiko. Pameran busana adalah bagian dari diplomasi budaya.

Roberth Rouw mengemukakan pengelolaan kebudayaan di kedua negara. Di Indonesia, penduduk Papua dibiarkan untuk melestarikan busana tradisional karena itu adalah kebudayaan. Bagaimanakah pemerintah Meksiko menjaga kebudayaan Aztec sebagai penduduk pribumi. Ia mengusulkan kepada Dubes agar membantu untuk mempromosikan alat-alat kesehatan produk Indonesia ke Meksiko karena kualitas yang bagus dan mumpuni. Roberth Rouw juga menanyakan bagaimana system pengupahan di Meksiko.

Anshory Siregar mengemukakan respons atas ide rumah budaya yang digagas KBRI Meksiko City. Sepanjang pengetahuannya, proposal Rumah Budaya sudah masuk ke Dikti ketika mengindik ke Kemendiknas. Sekarang Dikti mengindik ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, harus dicek kembali proposal rumah budaya tersebut mengingat terjadi perubahan kementerian. Anshory juga menyetujui gagasan produk alat kesehatan Indonesia untuk dipromosikan di Meksiko.

Saiful Bahri memberikan informasi mengenai Meksiko yang menjadi kartel Narkotika dan Obat-obatan terlarang. Meksiko menjadi wilayah sasaran antara mengingat Meksiko adalah pintu masuk strategis ke Amerika Serikat bagi penyelundup Narkotika. Hal ini mengingatkannya pada Indonesia yang menjadi pasar obat di wilayah Asia. Menurut Saiful Bahri, dalam konteks narkotika, Indonesia tengah memasuki Perang Proxy yang tidak melibatkan senjata sama-sekali melainkan melibatkan perang dagang antargeng narkoba. Indonesia tampaknya tengah dilumpuhkan melalui Perang Proxy ini. Ia juga mendukung inisiasi KBRI Meksiko City membangun Rumah Budaya di Meksiko City. Rumah Budaya, nantinya, diharapkan akan melahirkan silang budaya antara Indonesia dan Meksiko.

Merespons pendapat dan pertanyaan delegasi GKSB Meksiko, Dubes Yusra Khan mencoba merangkum jawaban. Untuk masalah kebencanaan, ia menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai kesamaan kondisi geografis: masuk dalam *ring of fire* sehingga rawan bencana. Terdapat banyak sekali gunung api seperti Puebla, Acapulco, serta naiknya air laut. Meksiko tidak pernah menyatakan bencana tsunami sebagai tsunami, mereka lebih memilih menggunakan istilah gelombang bah air laut. Meski kenyataannya gelombang tersebut sudah mencukupi untuk diistilahkan sebagai tsunami. Kebijakan pemerintah Meksiko terhadap bencana alam mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap pengurangan risiko bencana alam. Di tingkat pusat, pemerintah Meksiko membentuk lembaga *Protection Civil* yang diisi personel lintas kementerian dengan koordinasi satu atap. Kebijakan pengelolaan bencana diaplikasikan dalam keseharian warga negara. Sebut saja materi-materi pokok dalam pengurangan risiko bencana alam diinternalisasi lewat kurikulum sekolah. Selain itu, di banyak negara bagian, simulasi penanggulangan bencana dengan pengurangan risiko bencana alam acapkali dilakukan dengan keterlibatan masyarakat luas: mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pekerja, pejabat, dan lain-lain. Pengelolaan bencana di Meksiko dapat dikatakan maju.

Dubes Yusra Khan tertarik dengan ide festival film Indonesia di area kerja KBRI Meksiko City. Pihaknya tengah mencoba mewujudkan festival film Indonesia. KBRI Meksiko City juga telah bekerja sama dengan stasiun televisi milik pemerintah Meksiko

untuk penyiaran dan expose acara-acara yang dilaksanakan KBRI. Menurut Dubes Yusra Khan KBRI Meksiko City pernah mengadakan pagelaran busana di pusat-pusat industri busana seperti Guadalajara, dan Monteraux. Pagelaran busana menampilkan busana batik dalam pelbagai corak dan model.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, Dubes Yusra Khan mempunyai penilaian bahwa Meksiko sedang berhitung untung-rugi dengan masuknya Meksiko dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Alasannya, ada kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan Meksiko bahwa kepentingan Meksiko akan tergilas oleh Amerika Serikat. Padahal, dalam kenyataannya, pemberlakuan NAFTA yang sudah berjalan dua dekade menguntungkan Meksiko karena industri Amerika Serikat berpindah ke Meksiko. Pemerintah Meksiko mempunyai komitmen tinggi terhadap investasi asing dikarenakan menyangkut penyerapan tenaga kerja. Peraturan tentang bisnis dan perdagangan selalu dimonitor dengan ketat oleh pemerintah federal. Disiplin juga ditegakkan dalam menegakkan ketertiban dalam usaha dan perdagangan. Pemerintah Meksiko juga memperhatikan keterlibatan dan kepentingan lokal dalam investasi asing. Dalam hal ini, pemerintah Meksiko secara rutin melakukan pertemuan koordinasi antarinstansi pemerintah. Sebenarnya, citra Indonesia belum melekat di benak masyarakat Meksiko, begitu pula sebaliknya. Salah satu alasan yang dapat dikedepankan menjawab masalah ini adalah Produk Indonesia menyasar Amerika atau Asia, Meksiko belum menjadi pertimbangan utama dalam pemasaran produk Indonesia. Investasi Meksiko cukup menonjol di Indonesia semisal Kidzania (Pusat Permainan Anak di Jakarta), serta investasi plastik di Tangerang. Yang perlu digarisbawahi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) amat dilindungi di Meksiko

Pemerintah Meksiko melindungi pangan lokal. Agribisnis (jagung, tomat, stroberi) dan peternakan adalah produk ekspor utama Meksiko. Pemerintah Meksiko memperhatikan *organic agriculture* terutama untuk tanaman dan tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah Andean Belt.

Di bidang energi dan sumber daya alam, sempat terjadi MoU antara Pertamina dan Cemex. Namun KBRI mencatat tidak ada tindak lanjut atas nota kesepahaman kedua perusahaan minyak negara tersebut. Cemex malah melakukan eksplorasi

minyak dan gas bumi di Filipina. Memang, saat ini Cemex tengah menggulirkan reformasi regulasi pengadaan bahan bakar. Cemex dinilai terlalu memonopoli distribusi bahan bakar minyak dan gas di Meksiko.

**Pertemuan dengan Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,  
Inversion Y Tecnologia (COMCE)/ KADIN Meksiko  
Meksiko City, Senin 7 Maret 2016**

COMCE adalah KADIN Meksiko. Rombongan delegasi GKSBR DPR RI disambut dengan hangat oleh para pejabat di kantor COMCE. Para pejabat dari pihak COMCE yang hadir adalah: Vice President dan Direktur Jenderal Lic. Fernando Ruiz Huarte; Direktur Ekspor-Impor Rosalva Carreon Ibarra; Maria Romero, seorang pengacara dan investor; Gilberto de la Torre, pengusaha daging halal, kopi, dan cabai; Jorge Lopez Morton, direktur internasional COMCE dan pengusaha migas; Agustine Garcia Rechy, direktur COMCE untuk seksi Asia-Oceania; Fernando Hernandez, pengusaha daur ulang sampah; Jose S. Navarro Estrada, investor makanan khas Meksiko; Kaline Rubio, pengusaha produk global; Oscar Olibera, pengusaha bidang HAKI dan daging halal.

Dalam praktiknya, Fernando Ruiz Huarte mengakui bahwa dalam zaman demokrasi peran parlemen adalah penting dan strategis bagi kepentingan suatu negara. Dalam pertemuan ini, ia mengharapkan bahwa antara COMCE dan parlemen Indonesia dapat berperan lebih dalam menghubungkan kawasan Asia dan Amerika Latin. COMCE dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mengurus bisnis dan perdagangan membuka peluang kesempatan dagang yang lebih besar antara Indonesia dan Meksiko. Pertemuan antara COMCE dan DPR RI diharapkan menciptakan kesempatan perdagangan.

Merespons sambutan pihak COMCE, Wakil Ketua GKSBR DPR RI Hendrawan Supratikno mengawali sambutan dengan memperkenalkan anggota delegasi satu-persatu. Ia memaparkan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Meksiko telah berlangsung sejak 1953. Kami berharap, kedatangan delegasi GKSBR hari ini dapat meningkatkan kerja sama dengan Meksiko yang akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kedua negara dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. Indonesia dan Meksiko mempunyai persamaan misi untuk meningkatkan hubungan dengan mitra regional. Dalam hal ini, Indonesia dengan kawasan Amerika Tengah dan Meksiko dengan kawasan Asia.

Hendrawan Supratikno menginformasikan kepada COMCE bahwa Grup Kerjasama Bilateral adalah kelompok yang didirikan dengan fungsi untuk mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko. Dalam perspektif diplomasi, DPR mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di Meksiko, tidak terkecuali para pemangku di bidang usaha dan bisnis. Hal ini mengingat tugas dan fungsi KADIN di kedua negara yang kurang lebih sama yakni sebagai sarana komunikasi antarpengusaha nasional dengan pengusaha asing serta dengan pihak pemerintah dalam mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Hendrawan Supratikno mengajak rekan-rekan COMCE Meksiko untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan bisnis dan investasi dengan KADIN Indonesia. Kedua negara harus memperkuat kerjasama ekonomi melalui promosi perdagangan dan peningkatan investasi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, perdagangan bilateral pada 2015 antara kedua negara terus meningkat dengan nilai selalu di atas USD 1 miliar untuk perdagangan dan USD 2,1 juta untuk investasi. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia memandang Meksiko sebagai mitra kerja yang penting dan strategis.

Pihak COMCE menyajikan presentasi memulai bisnis di Meksiko. Beberapa poin penting yang disampaikan pihak COMCE saat akan membuka bisnis di Meksiko:

1. Otorisasi dari kementerian keuangan
2. Registrasi nomor induk usaha
3. Setiap usaha akan mendapat *assessment* dari social security investment institute
4. Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi poin penting berbisnis di Meksiko

Delegasi GKSB DPR RI menanyakan beberapa hal terkait bisnis. Hendrawan Supratikno memulai diskusi seputar *property restriction area* dan *limitation on specific area*. Wihadi Wijanto bertanya tentang *intellectual property rights* (HAKI). Beberapa isu perdagangan juga didiskusikan semisal keterlibatan Meksiko dalam TPP,

Agustin Garcia Rechy menyampaikan jaminan bahwa investasi asing di Meksiko sangat dilindungi oleh negara. Investasi di Meksiko bahkan menjadi pilihan alternatif di

kawasan Amerika Latin. Bahkan kita mempunyai *double taxation agreement*. Meksiko mempunyai beberapa protokol untuk kualifikasi produk ekspor, semisal protocol produk pertanian dan protokol produk laut. Menyinggung soal TPP, Agustin menyebut Meksiko berkeinginan untuk berpartisipasi dalam TPP dengan pertimbangan antara lain: TPP akan membuka akses pasar bagi produk-produk Meksiko, TPP akan menjamin keselamatan dan kualitas produk-produk Meksiko, selain itu TPP akan melebarkan perdagangan bebas antara Meksiko dan negara-negara mitranya.

Sebagai tambahan informasi, beberapa *Free Trade Agreement* (FTA) yang telah dimiliki Meksiko turut memasukkan bab khusus yang membahas perjanjian IPPA (*Investment Promotion and Protection Agreement*) seperti antara lain dengan AS, Kanada, Chile, Colombia, Jepang yang memberikan kerangka hukum lebih kuat bagi perlindungan FDI di Meksiko. Beberapa IPPA lainnya ditandatangani oleh Meksiko dengan negara-negara sebagai berikut: Panama, Argentina, Uruguay, Trinidad Tobago, Kuba, India, Australia, Singapura dan negara-negara Uni Eropa (kecuali Swiss).

Oscar Olibera, pengusaha bidang HAKI dan daging halal mengatakan bahwa dirinya sebagai pengusaha daging halal sudah mempunyai kualifikasi prosesi penyembelihan hewan halal. Ia mengakui di beberapa negara tertentu sertifikasi halal masih mahal, maka ia melihat peluang ekspor daging halal ke Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa HAKI sangat dilindungi di Meksiko.

Dalam pada itu, Ansory Siregar menyambut baik produk daging halal Meksiko untuk masuk ke Indonesia. Ia secara pribadi menilai bahwa daging sapi Meksiko lebih enak dan lebih bagus kualitasnya ketimbang daging sapi negara lain yang masuk ke Indonesia.

Jorge Lopez Morton menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi warga negara asing untuk memiliki aset properti di wilayah Meksiko. Kepemilikan aset properti, menurutnya, terbuka untuk umum. Ia menambahkan keterangan bagi siapa saja yang berbisnis di Meksiko: bahwa bisnis usaha nuklir masih merupakan hal yang terlarang di Meksiko. Selain itu, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius di Meksiko.



**Pertemuan dengan Direccion General Para Asia Pacifico de la Secretaria de Relaciones Exteriores/ Direktorat Jenderal Asia Pasifik Kemlu Meksiko**

**Meksiko City, Senin 6 Maret 2016**

Kunjungan delegasi GKSB DPR RI ke Kementerian Luar Negeri Meksiko disambut oleh Direktur Jenderal untuk Asia Pasifik EMB Alfonso de Maria Y Campos Castello. Selain Direktur Jenderal, pertemuan bilateral GKSB-Kementerian Luar Negeri juga dihadiri oleh pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal untuk Asia Pasifik, di antaranya: Regina Salazar Avalos yang menjabat Wakil Direktur Jenderal Hubungan dengan Kongres, Direktorat Jenderal Koordinasi Politik; Alejandro Ramos Cardozo yang menjabat Wakil Direktur Asia Pasifik; dan Lic Francisco Mosqueda Brito yang menjabat Direktur untuk Indonesia dan India.

Djoko Udjiyanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Meksiko atas sambutan dan atensi menyambut GKSB Meksiko. Sebagai ketua delegasi GKSB, Djoko Udjiyanto menginformasikan bahwa GKSB DPR RI memiliki fungsi untuk mempererat hubungan bilateral antarnegara dalam beragam sektor seperti investasi, perdagangan, bisnis dan sektor lain yang bermanfaat bagi kedua negara.

Hubungan baik antara Indonesia dengan Meksiko harus terus dijaga, tidak hanya melalui kementerian luar negeri, tapi juga melalui parlemen. DPR RI, selain tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting, memiliki peran baru yakni mendukung pemerintah RI dalam menjalankan politik luar negeri.

Alfonso de Maria menyampaikan kesannya bahwa Indonesia adalah negara besar di kawasan Asia. Mengingat penting dan strategisnya posisi Indonesia di kawasan, Meksiko dan Indonesia mesti mengintensifkan peluang kerjasama. Lebih lanjut, Alfonso menilai Indonesia dan Meksiko mempunyai banyak kesamaan, salah satunya ia menyebut Meksiko mempunyai 60 bahasa lokal, sementara Indonesia mempunyai ratusan bahasa lokal yang masih dipercakapkan sehari-hari. Ia mengaku terkesan dengan kebudayaan Indonesia semisal wayang, tari, budaya, dan terutama

pariwisata Bali. Menurutnya lagi, Meksiko dan Indonesia harus memperkuat kerjasama bilateral pada beberapa bidang: ekonomi, perdagangan, dan politik.

Menurut Alfonso de Maria, Meksiko kini tengah mengembangkan bisnis halal bagi produk makanan terutama daging sapi. Beberapa perusahaan di Meksiko tengah giat menggalakkan bisnis halal ini. Bisnis ini tidak dapat berkembang di Meksiko, karena hanya 1 persen pasar Meksiko yang memanfaatkan produk halal ini. Oleh karena itu, peluang kerjasama halal ini akan meningkat dan berkembang bila bekerjasama dengan negara-negara sahabat kami yang mayoritasnya menganut agama Islam. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka dirinya berharap kerjasama pangan halal ini dapat direalisasikan di Indonesia.

Indonesia dan Meksiko, seperti dikatakan Saiful Bahri Ruray, berbagi kesamaan sejarah dan geografi. Secara historis, Indonesia dan Meksiko adalah negara pascakolonial. Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari Belanda setelah melalui perjuangan fisik yang panjang selama 300-an tahun. Sementara Meksiko mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol setelah perjuangan fisik yang panjang selama 300-an tahun. Artinya, kedua negara tidak mendapatkan kemerdekaan secara cuma-cuma. Meksiko dan Indonesia sama-sama kedatangan kapal-kapal galleon bangsa Eropa untuk menjajah dan mengeruk kekayaan alam kedua negara.

Beberapa isu ditanyakan delegasi GKSB DPR RI: posisi Meksiko terhadap rebutan klaim Laut Cina Selatan, posisi Meksiko terhadap Pemilu Amerika Serikat, serta posisi MIKTA, dan TPP.

Dalam perspektif Alfonso de Maria, permasalahan di Laut Cina Selatan mengkhawatirkan kawasan. Perseteruan di kawasan Asia dapat saja merembet ke negara-negara di kawasan Pasifik. PBB harus turun tangan mengatasi masalah tersebut dengan damai dan bermartabat. Indonesia dapat memfasilitasi dialog antarpihak yang bertikai. Pemilu Amerika Serikat adalah urusan dalam negeri Amerika Serikat. Meksiko tidak akan mencampuri urusan negara orang. Meksiko tidak peduli dengan salah satu calon Presiden Amerika Serikat yang salah satu programnya adalah membangun tembok tinggi sebagai tapal batas kedua negara. Ada atau tidak ada tembok tinggi, relasi kedua negara tetap berjalan.

Meksiko memanfaatkan organisasi regional sebagai zona ekonomi dan politik. Bersama dengan Indonesia, Meksiko memanfaatkan MIKTA dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Meksiko sedang memikirkan kembali keanggotaan di TPP. Pertimbangan Meksiko adalah kepentingan dalam negeri Meksiko berhadapan dengan kepentingan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat.

Dalam catatan Kementerian Luar Negeri Meksiko, Indonesia dan Meksiko memiliki 23 *bilateral agreement*. Kita perlu memikirkan kembali bagaimana implementasi keberlanjutan kerjasama bilateral Indonesia dan Meksiko.

**Pertemuan dengan Comision de Relaciones Exteriores de la Camara de Diputados/ Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Meksiko**

**Meksiko City, Selasa 7 Maret 2016**

Delegasi GKSMB Meksiko mengunjungi Komisi Hubungan Luar Negeri Camara de Diputado Meksiko. Anggota delegasi GKSMB disambut hangat oleh Victor Manuel Giorgana Jimenez selaku ketua Komisi. Pertemuan dimoderatori oleh Carlos Federico Quinto Guillen dan maria Marcela Gonzales Salas y Petricioli.

Djoko Udjiyanto selaku Ketua GKSMB memperkenalkan rombongan delegasi GKSMB Meksiko. Dalam sambutannya, Djoko Udjiyanto menyampaikan kepada hadirin bahwa GKSMB diharapkan menjadi *focal point* khususnya dalam peningkatan hubungan bilateral antara kedua parlemen, dan secara umum diharapkan berkontribusi dalam mempromosikan hubungan bilateral Indonesia-Meksiko baik itu *Government to Government, Business to Business, ataupun Parliament to Parliament*, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang strategis lainnya.

Kepada mitranya dari Parlemen Meksiko, Djoko Udjiyanto menguraikan bahwa GKSMB ini dapat berperan mengurai tantangan-tantangan yang ada terkait kerja sama bilateral Indonesia-Meksiko serta untuk memperkuat koordinasi antarkedua negara, terutama dalam konteks bertukar pandangan dalam fungsi-fungsi keparlemenan. GKSMB juga dapat berperan lebih jauh dalam menggalang kerja sama bilateral bagi penyelesaian berbagai isu regional dan global.

Victor Manuel Giorgana Jimenez menyambut hangat kedatangan rombongan delegasi GKSMB DPR RI. Sebagai sesama anggota parlemen ia mengapresiasi kunjungan kehormatan DPR RI ke *Camara de Diputados* Meksiko. Ia memberi penjelasan singkat bahwa *Camara de Diputados* terdiri dari 500 anggota yang datang dari 8 partai politik pemenang Pemilu. Dari 500 anggota *Camara de Diputados*, 300 anggota dipilih langsung oleh rakyat dan 200 anggota sisanya mendaftar secara proporsional.

Indonesia dan Meksiko telah menjalin hubungan diplomatik dalam kurun 60 tahun. Dalam kurun yang sedemikian lama, kedua negara sepertinya harus dapat mengambil manfaat semaksimal mungkin. Per 2016 ini Indonesia dan Meksiko

mempunyai 20 perjanjian bilateral mulai dari perdagangan, diplomasi, kejahatan transnasional, lingkungan hidup, dan kebudayaan. Melalui hubungan kerjasama bilateral kedua parlemen, perjanjian bilateral kedua negara dapat diamati dan dicermati implementasi di lapangan.

Indonesia dan Meksiko mempunyai kedudukan strategis di kawasan Asia dan Amerika Latin. Oleh karenanya, kedua negara harus dapat memainkan peran penting di kedua kawasan. Dalam konteks parlemen, DPR RI dan Camara de Diputados berpeluang mendiskusikan secara terbuka isu-isu energi, energi hijau, dan lingkungan hidup.

Carlos Quinto menginformasikan bahwa Kongres Meksiko (*Camara de Diputados dan Senador*) secara berkala mengadakan dialog proaktif salah satunya adalah dialog dan kegiatan kebudayaan. Dalam konteks ini, pihaknya akan mencoba memasukkan tema Indonesia dalam minggu budaya di DPR. Ruang dialog budaya ini akan membuka peluang kerjasama baru antara kedua negara.

Dalam konteks kesetaraan gender, Camara de Diputados baru saja mengadakan acara peringatan International Women Day. Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri Camara de Diputados Martha Cristina Jimenez Marquez menambahkan bahwa 42 % dari 500 anggota Camara de Diputados adalah perempuan. Sementara itu, 20 dari 29 anggota komisi hubungan luar negeri Camara de Diputados adalah perempuan.

Masih dalam konteks gender di Meksiko, Maria Marcela menerangkan bahwa perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, hak dan kesempatan laki-laki dan perempuan juga sama. Meksiko mempunyai UU yang mewajibkan kuota 50 % perempuan bagi calon anggota legislatif. Keterwakilan perempuan yang duduk sebagai menteri di pemerintahan Meksiko juga cukup tinggi. Terhitung 2/3 menteri di pemerintahan Meksiko, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Pembangunan, dan Jaksa Agung, adalah perempuan. Sekitar 41 % pendidik (mencakup guru dan dosen) di Meksiko adalah perempuan. Mempertimbangkan pentingnya peran pemuda bagi masa depan sebuah bangsa, Meksiko membangun Pusat Pemberdayaan Pemuda yang salah satu fungsinya adalah memberdayakan partisipasi perempuan dalam politik, industri, dan budaya.

Kedua delegasi bersepakat mengenai masalah perempuan di Indonesia dan Meksiko, yakni: kekerasan terhadap perempuan, kesempatan kerja, kesetaraan, hak-hak perempuan, upah dan penghasilan, serta akses ke sumber ekonomi dan politik.

Membandingkan Indonesia dan Meksiko, kata anggota GKSB DPR RI Achmad Mustaqim, ada semangat di kedua negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan publik. Dalam kasus Indonesia, representasi perempuan dalam jabatan publik diatur dalam UU Nomor 8/ 2012 tentang pemilihan umum DPR/ DPD/ DPRD. Berdasarkan UU tersebut, kuota keterwakilan 30 % untuk perempuan diterapkan bagi calon anggota legislatif, pengurus partai, dan penyelenggara pemilu. Pemilu 2014 menempatkan 97 anggota parlemen perempuan di DPR RI untuk periode 2014-2019 (kira-kira 17,32 % dari 560 kursi).

Indonesia menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, untuk itu Indonesia memberlakukan UU Nomor 35/ 2014 tentang perlindungan anak. Selain itu, Indonesia mendirikan Komnas Perempuan tahun 1998 sebagai mekanisme nasional pertama untuk penyelesaian kekerasan terhadap perempuan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Sebagai instrumen penerapan pengarusutamaan gender juga untuk perlindungan terhadap anak dan perempuan, Kepolisian Republik Indonesia mendirikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk penanganan tindak kejahatan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak didirikan pada Oktober 1998 dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka serta memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Aspek hukum juga menjadi topik pembicaraan antara delegasi GKSB DPR RI dan Camara de Diputados. Terkait juga dalam pembicaraan ini seputar hukuman mati, penindakan terhadap kejahatan narkoba, penanganan pemakai dan pengedar narkoba, serta aparat penegak hukum.

Menurut Carlos Quintana, hukuman mati dilarang di Meksiko. Hal ini tertuang dalam konstitusi Meksiko. Dua anggota Komisi Hubungan Luar Negeri: Maria Guadalupe Alcantara Rojas dan Arlette Ivette Munoz Cervantes secara bersamaan

mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercakup dalam Universal Declaration of Human Rights.

Narkotika adalah kejahatan serius terhadap masa depan bangsa. Dalam hukum Meksiko, narkoba adalah kejahatan berat. Oleh karenanya, pemerintah Meksiko menjadikan pemberantasan narkoba sebagai kebijakan publik. Bahkan pemberantasan terhadap mafia narkoba menjadi program permanen setiap pemerintah yang berkuasa di Meksiko.

Secara statistik, pengguna narkoba berjumlah 4 % dari populasi penduduk Meksiko, sementara mantan pengguna narkoba berjumlah 12 %. Meksiko merupakan pintu masuk bagi kartel narkoba Kolombia ke Amerika Serikat. Melihat rawannya perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, kedua pemerintah menjalin kerjasama untuk meminimalisasi penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Bisnis narkoba memang menggiurkan secara finansial. Misalnya: Gerciro—sejenis heroin dan amopala—dihargai MXN 1.000 di Meksiko. Keuntungan akan berlipat ganda jika gerciro masuk ke pasar Amerika Serikat. Penjualan gerciro di pasar Amerika Serikat menjadi USD 200.000. Kongres Meksiko kini tengah menggodok rancangan undang-undang agenda nasional tentang pengesahan atau legalisasi penggunaan mariyuana untuk kesehatan.

Pemberantasan kartel narkoba memang menjadi tugas, pokok, dan fungsi kepolisian federal Meksiko, namun Angkatan Darat dan mariner turut ambil bagian dalam pencegahan penyelundupan kartel narkoba. Kepolisian di negara bagian mempunyai tugas pemberantasan kartel narkoba di daerahnya masing-masing. Kebijakan penangkapan gembong narkoba juga dilakukan secara masif yang berujung pada penangkapan 90, dari 122, gembong dan kartel narkoba. Ini menjadi prestasi tersendiri bagi kepolisian Meksiko. Meskipun demikian, perang antarkartel narkoba masih kerap terjadi di Meksiko.

Wihadi Wijanto menyampaikan paparan tentang penanganan narkoba di Indonesia. Indonesia mempunyai lembaga khusus yang menangani pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Lembaga tersebut dinamakan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan ini terdiri dari anggota kepolisian serta tenaga ahli yang terkait

dengan narkoba. Meskipun demikian, polisi juga mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran narkoba.

Pengguna dan pengedar narkoba mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Bagi pengguna narkoba yang tertangkap oleh aparat BNN dapat direhabilitasi dengan cara menggunakan fasilitas negara. Jika pengguna narkoba ditangkap oleh aparat kepolisian maka ia akan dituntut secara pidana di muka pengadilan. Sementara itu, pengedar dan gembong narkoba dapat dijatuhi hukuman mati. Sejauh ini sudah 12 gembong narkoba yang dijatuhi hukuman mati.

Narkotika di Indonesia kebanyakan datang dari luar negeri, kecuali ganja yang memang jenis tanaman yang tumbuh di beberapa tempat Indonesia.

Beberapa hal seputar pertahanan dan kesejahteraan sosial juga dibahas kedua parlemen. Djoko Udjiyanto menanyakan sikap parlemen Meksiko terhadap isu Laut Cina Selatan dan hubungannya dengan wilayah Asia Pasifik. Ia juga menanyakan postur anggaran pertahanan Meksiko. Sementara itu, Roberth Rouw menyaksikan demonstrasi sekelompok orang di Meksiko City. Melihat hal tersebut ia menanyakan soal isu upah di Meksiko. Seputar isu LGBT yang sedang menjadi wacana hangat di Indonesia, delegasi GKSB DPR RI memandang perlu berbagi informasi dengan Meksiko

Meksiko mempunyai pandangan untuk memegang prinsip perdamaian sesuai Piagam PBB. Konflik dan perang di Laut Cina Selatan akan berimbas juga ke kawasan pasifik di mana Meksiko masuk di dalamnya. Postur anggaran pertahanan Meksiko termasuk kecil di kawasan Amerika yakni sekitar USD 5,55 miliar. Nilai itu jika dikalkulasi menjadi sekitar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP).

Masalah klasik ketenagakerjaan adalah ketidakpuasan pekerja akan penghasilannya. Di Meksiko tidak ada patokan upah minimum regional, akan tetapi jika dikalkulasi rata-rata, pekerja di Meksiko memperoleh MXN 70 (setara dengan USD 3,50) per hari. Camara de Diputados sebagai representasi rakyat sejauh ini telah melakukan legislative action terkait upah pekerja. Camara de Diputados dalam posisi berpandangan bahwa jangan sampai masalah upah ini menghambat pertumbuhan ekonomi Meksiko.



Menurut Carlos Quintana, Meksiko memberikan kebebasan preferensi seksual bagi warga negara, termasuk kaum LGBT. Pernikahan sesama jenis dapat dilaksanakan dengan landasan hukum fatwa Mahkamah Agung. Atas dasar itu, pasangan sesama jenis mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Meksiko.

Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Cámara de Diputados menyampaikan rencana akan diresmikannya GKSBB Cámara de Diputados-DPR RI.

Di akhir acara seluruh delegasi GKSBB DPR RI berkesempatan mendatangi tempat sidang anggota Cámara de Diputados. Secara resmi, delegasi GKSBB DPR RI yang dipimpin oleh Djoko Udjiyanto diperkenalkan kepada ketua dan seluruh anggota Cámara de Diputados yang tengah bersidang.

**Pertemuan dengan Secretaria de Economia y Promexico/  
Kementerian Perekonomian Meksiko  
Meksiko City, Selasa 7 Maret 2016**

Dalam pertemuan dengan delegasi GKSB DPR RI, ProMeksiko dan Kementerian Perekonomian memperkenalkan pejabat yang mengikuti pertemuan dengan delegasi GKSB DPR RI. Pihak ProMeksiko dan Kementerian Perekonomian diwakili oleh Alberto Guadarrama Grimaldo selaku Direktur untuk APEC, Asia Pasifik; Roberto Camarena Macias selaku Direktur untuk Asia, dan Adriana Garmendia Arias selaku Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Djoko Udjiyanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada ProMeksiko dan Kementerian Perekonomian Meksiko atas sambutan dan atensi menyambut GKSB Meksiko. Sebagai ketua delegasi GKSB, Djoko Udjiyanto memperkenalkan satu-persatu delegasi GKSB DPR RI. Djoko Udjiyanto menginformasikan bahwa GKSB DPR RI memiliki fungsi untuk mempererat hubungan bilateral antarnegara dalam beragam sektor seperti investasi, perdagangan, bisnis dan sektor lain yang bermanfaat bagi kedua negara.

Dalam pandangan GKSB DPR RI, hubungan baik antara Indonesia dengan Meksiko harus terus dijaga, tidak hanya melalui kementerian luar negeri, tapi juga melalui parlemen. DPR RI, selain tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting, memiliki peran baru yakni mendukung pemerintah RI dalam menjalankan politik luar negeri. Dalam konteks bisnis, GKSB memandang penting peran yang dimainkan ProMeksiko dalam merajut kerjasama bisnis dengan negara-negara mitra.

Menurut Adriana Garmendia Arias, dalam presentasinya, Promexico adalah sejenis lembaga negara yang menangani investasi atau penanaman modal di Meksiko. Secara struktur, ProMeksiko adalah subbagian dari Kementerian Perekonomian yang menggalakkan perdagangan internasional dan investasi. ProMeksiko mendorong partisipasi Meksiko dalam kancah perdagangan internasional serta mewujudkan Meksiko sebagai negara tempat tujuan yang aman, menarik, dan berdaya saing bagi investasi asing.

Selain itu, ProMeksiko juga mendorong daya ekspor produk-produk nasional Meksiko dan mendukung perusahaan-perusahaan Meksiko untuk go publik. ProMeksiko menyediakan layanan konsultasi khusus untuk meningkatkan ekspor produk dan jasa serta memperluas bisnis Meksiko di luar negeri, dan memandu investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) ke negara itu.

Dalam paparannya lebih lanjut, Adriana Garmendia Arias mengungkapkan bahwa terdapat *action plan* untuk menjadikan Meksiko sebagai *global leadership*. Salah satu cara mencapai visi tersebut adalah dengan partisipasi global Meksiko dalam organisasi regional ataupun multilateral. Dalam perhitungan Meksiko, TPP akan melibatkan 28% populasi dunia. Sampai saat ini, Meksiko masih menimbang keikutsertaannya dalam keanggotaan TPP dengan beberapa pertimbangan antara lain daya saing dengan Amerika Serikat sebagai pemain besar di kawasan.

Dalam paparannya, Adriana juga menyinggung rencana kerja nyata Meksiko menghadapi perdagangan bebas. Menurutnya, sebagai bentuk peningkatan daya saing di kancah global, pemerintah Meksiko tengah menjalankan program reformasi, antara lain: energi, buruh, pendidikan, *national code of criminal procedure*, dan *law of citizen protection*.

Roberto Camarena Macias memulai diskusi dengan makro ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya. Penguatan mata uang dollar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Meksiko. Hal ini ditambah dengan dimasukkannya mata uang Yuan Cina sebagai mata uang cadangan (*special drawing rights/ SDR*) IMF. Rentetan perekonomian global tersebut menyulitkan daya ekspor Meksiko ke negara-negara mitra. Selain itu, tren perekonomian global juga memaksa Pemerintah Meksiko untuk merevisi pertumbuhan ekonomi dengan estimasi kenaikan 2,5 % per tahun. Meksiko menduduki peringkat ke-14 besar ekonomi dunia, sementara Indonesia menduduki peringkat ke-15 besar ekonomi dunia.

Delegasi GKSB DPR RI, sebagaimana disuarakan oleh Djoko Udjiyanto, Wihadi Wijanto, Ansory Siregar, Roberth Rouw, menanyakan beberapa hal seputar ekspor-impor Meksiko, TPP, pengadaan alutsista, Madrid Protocol, kebijakan dumping, industri halal, dan alat kesehatan (alkes).

Menjawab pertanyaan delegasi GKSB DPR RI, Alberto menerangkan bahwa Meksiko mendukung penuh perdagangan bebas. Menurut Alberto, salah satu faktor yang mendukung perdagangan internasional Meksiko adalah banyaknya jumlah Free Trade Agreements yang dimiliki Meksiko dengan negara lain. Meksiko memiliki 10 FTA dengan 44 negara. Kesepuluh FTA yang dimiliki Meksiko adalah dengan negara-negara sebagai (1) FTA Meksiko-Amerika Serikat, Kanada (NAFTA); (2) FTA Tunggal Meksiko-Amerika Tengah (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa-Rica); (3) FTA Meksiko-Chile; (4) FTA Meksiko-Uruguay; (5) FTA Meksiko-Kolombia; (6) FTA Meksiko-Peru; (7) FTA Meksiko-Uni Eropa; (8) FTA Meksiko-Israel; (9) FTA Meksiko-EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Swis); dan (10) EPA Meksiko-Jepang.

Menurut Alberto, TPP akan menjadi peluang besar Meksiko dalam membuka pasar yang lebih luas lagi bagi produk-produk Meksiko. Posisi perdagangan bebas yang demikian esensial dan bergerak lintas negara tanpa disadari membawa nilai-nilai ekonomi yang mengglobal (*global value chains*). Dengan perdagangan bebas Meksiko optimis menjadi pemain dalam mata rantai pasokan global.

Kami mengadopsi Madrid Protocol untuk melindungi dan memperkuat bisnis Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) kami sehingga dapat eksis dalam perdagangan bebas. Sertifikasi halal memang masih menjadi sesuatu yang baru di Meksiko. Namun, Meksiko terus mengembangkan usaha ini. Terbukti sampai hari ini terdapat dua restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, kami berharap dapat menjalin kerjasama sertifikasi halal.

Ia menjelaskan komoditas ekspor unggulan Meksiko adalah: minyak mentah, produk elektronik, suku cadang dan kendaraan bermotor, sementara komoditas ekspor hasil bumi Meksiko adalah: Jagung, gandum, beras, kacang-kacangan, kopi, tomat dan buah-buahan. Komoditas impor yang dibutuhkan Meksiko adalah: kendaraan bermotor, suku cadang, komponen elektronik, gas alam, bensin, obat-obatan, produk rumah tangga dari bahan plastik, barang-barang elektronik, produk kimia, aluminium, kapas, kacang kedelai, jagung dan daging.

Meksiko tidak mempunyai industri militer dan pertahanan. Sebagian besar alat utama sistem persenjataan (alutsista) Meksiko diimpor dari Amerika Serikat.

Di akhir diskusi, Alberto memberikan informasi bahwa ProMeksiko akan membuka kantor cabang di Indonesia. Kami menunggu persetujuan legislasi dari Parlemen Meksiko dan menunggu Pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat di Meksiko.

**Pertemuan dengan Proteccion Civil/  
BNPB Meksiko  
Meksiko City, Selasa 7 Maret 2016**

Protection Civil adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di Meksiko. Dalam pertemuan dengan delegasi GKSBR DPR RI pihak Protection Civil dihadiri oleh:

1. Mr. Luis Felipe Puente Espinosa (National Coordinator of Civil Protection Kementerian Dalam Negeri Meksiko)
2. Mrs. Maria Elena Orantes Lopez (Ketua Komisi Civil Protection Camara de Diputados)
3. Mr. Ricardo de la Cruz Musalem (Direktur Jenderal Civil Protection Kementerian Dalam Negeri Meksiko)
4. Mr. Jose Maria Tapia Franco (Direktur Jenderal Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Meksiko)
5. Mr. Carlos Valdes Gonzales (Direktur Jenderal Pusat Pencegahan Bencana Nasional Kementerian Dalam Negeri Meksiko)
6. Mr. Rogelio Rafael Conde Garcia (Direktur Jenderal Liaison, Inovasi, dan Regulasi Kementerian Dalam Negeri Meksiko)
7. Mrs. Regina Salazar Avalos (Deputi Direktur Penghubung Koordinasi Politik Kongres Kementerian Luar Negeri Meksiko)
8. Mr. Josue Jonnathan Serrano Venancio (Deputi Direktur Jenderal Koordinasi, Analisis, dan Regulasi Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri)
9. Mr. Victor Alonso Aznar Osornio

Pertemuan dibuka dengan ucapan selamat datang dan sambutan oleh Koordinator Nasional Civil Protection Meksiko Mr. Luis Felipe Puente Espinosa. Sementara itu, Ketua Delegasi GKSBR DPR RI Djoko Udjiyanto dalam sambutannya mengucapkan apresiasi atas sambutan pihak Protection Civil Meksiko atas kesempatan pertemuan bilateral. Sebagai Ketua Delegasi GKSBR DPR RI, Djoko Udjiyanto memperkenalkan delegasi GKSBR DPR RI satu persatu. Djoko Udjiyanto menginformasikan bahwa GKSBR DPR RI untuk Parlemen Meksiko diharapkan menjadi *focal point* khususnya dalam peningkatan hubungan bilateral antara kedua parlemen, dan secara umum diharapkan berkontribusi dalam mempromosikan hubungan bilateral Indonesia-Meksiko baik itu *Government to Government*, *Business to Business*,

ataupun *Parliament to Parliament*, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang strategis lainnya.

Djoko Udjiyanto menyampaikan pandangan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Meksiko telah berlangsung sejak 1953. Kedatangan delegasi GKSB hari ini dapat meningkatkan kerja sama dengan Meksiko yang akan difokuskan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kedua negara dan dilandaskan kepada kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. Indonesia dan Meksiko mempunyai persamaan misi untuk meningkatkan hubungan dengan mitra regional. Dalam hal ini, Indonesia dengan kawasan Amerika Tengah dan Meksiko dengan kawasan Asia.

Dalam perspektif kebencanaan, menurut Djoko Udjiyanto dalam sambutannya, Indonesia dan Meksiko perlu berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana menjadi penting dikemukakan dalam forum ini mengingat Indonesia dan Meksiko secara geografis terletak di jalur rawan bencana. Berbagai macam bencana seperti angin topan, badai, banjir, tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi kerap melanda kedua negara. Dalam konteks ini, Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) adalah kelompok yang didirikan dengan fungsi untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko termasuk untuk berbagi *best-practice* dalam pengelolaan dan manajemen mitigasi bencana alam.

Sebagai pengantar, Luis Felipe Puente Espinosa memberikan latar belakang sistem penanggulangan bencana alam di Meksiko. Meksiko adalah negara rawan terdampak berbagai bencana alam; berbagai bencana alam kerap melanda Meksiko secara berulang. Pada pertengahan 1980-an, gempa bumi besar menghancurkan Meksiko City dan memicu dialog nasional tentang pengelolaan risiko bencana (*Disaster Risk Management*). Pasca gempa bumi tersebut, Pemerintah Meksiko terus memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan risiko bencana dan menciptakan aturan kelembagaan untuk implementasi di lapangan.

Setelah gempa bumi, Pemerintah Federal Meksiko mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung kebutuhan rekonstruksi dan untuk memperkuat sistem perlindungan sipil. Protection Civil didirikan pada Oktober 1985 di bawah kepemimpinan Presiden sebagai langkah awal untuk mengatasi kebutuhan penduduk

yang terkena bencana. Komisi juga diminta untuk membangun diperlukan mekanisme, sistem, dan organisasi untuk lebih membantu populasi yang terkena dampak bencana di masa depan.

Di akhir sambutan pengantarnya, Luis Felipe Puente Espinosa menjelaskan bahwa sejak berdirinya, Protection Civil telah melembagakan manajemen risiko bencana di Meksiko. Pemerintah Federal Meksiko mendefinisikan *disaster risk management* sebagai proses perencanaan, partisipasi, intervensi, pengambilan keputusan, serta desain dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk: (1) memahami penyebab risiko; (2) mengurangi risiko; (3) mitigasi dampak sosial dari bencana; dan (4) memperkuat ketahanan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana alam. Definisi ini menyiratkan pendekatan multidisiplin yang memerlukan komitmen yang kuat dari semua tingkat pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada kesempatan tersebut, Jose Maria Tapia Franco dan Maria Elena Orantes Lopez memberikan presentasi tentang sistem mitigasi kebencanaan dari perspektif eksekutif dan legislatif.

Pada kesempatan pertama, Jose Maria Tapia Franco memberikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Meksiko. Ia memulai paparan tentang gempa bumi dahsyat yang melanda Meksiko pada 1985 silam dengan korban jiwa tak kurang dari 4.539; 20.000 orang terluka dengan kerugian ekonomi USD 8 miliar. Lembaga atau badan yang terlibat dalam evakuasi bencana alam kala itu: Angkatan Bersenjata, pemadam kebakaran, polisi federal, palang merah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Meksiko, karena faktor geografi, terkena berbagai macam bencana geologi dan hidrometeorologi yang membahayakan penduduk. Gempa bumi, gunung berapi, tsunami, angin topan, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan adalah ragam bencana alam yang melanda Meksiko. Antara 1970 dan 2009, sekitar 60 juta orang yang terkena dampak bencana alam di Meksiko. Karena seringnya dilanda bencana alam, Meksiko mendapat peringkat sebagai salah satu, dari 30 negara, negara yang paling sering terlanda tiga atau lebih jenis. Terletak di sepanjang "sabuk api" di



mana 80 persen dari aktivitas seismik di dunia terjadi, Meksiko berisiko tinggi terhadap bencana geologi. Rata-rata, Meksiko mengalami lebih dari 90 gempa bumi per tahun dengan besarnya 4.0 atau lebih pada skala Richter. Hampir semua wilayah Meksiko, termasuk ibukota Meksiko City, terdampak risiko gempa. Meksiko City juga terletak di dalam *Trans-Mexico Volcanic Belt*, yang berisi sembilan gunung api aktif. Selain itu, tsunami merupakan ancaman nyata bagi Meksiko di pantai Pasifik.

Bencana hidrometeorologi terjadi dengan frekuensi tinggi di Meksiko. Peristiwa ini berkisar dari siklon tropis yang cukup tinggi di sepanjang kedua pantai Pasifik dan Atlantik yang menyebabkan hujan deras dengan badai intensitas tinggi terjadi di seluruh wilayah Meksiko. Kekeringan juga menjadi bencana yang signifikan, terutama untuk sektor pertanian Meksiko. Bencana lain yang berdampak luas di Meksiko adalah kebakaran hutan dan tanah longsor.

Sejarah berdirinya Protection Civil tidak terlepas dari gempa bumi dahsyat yang melanda Meksiko pada 19-20 September 1985, dengan besaran 8,1 dan 7,3 pada skala Richter. Mala tersebut menandai pergeseran dalam manajemen risiko bencana di Meksiko. Lebih dari 20 juta orang di Meksiko merasakan getaran; gempa bumi menewaskan 6.000 orang dan menghasilkan kerugian langsung dan tidak langsung sebesar sekitar USD 8.300.000.000. Kerusakan bangunan dan infrastruktur menyumbang sekitar 87 persen dari kerugian. Sisanya 13 persen hilangnya pendapatan atau produksi, biaya penyediaan layanan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Hampir 1.700 sekolah rusak, dan 30 persen dari kapasitas rumah sakit di Meksiko City hancur. Sekitar 250.000 orang menjadi tunawisma dan hampir 900.000 yang tersisa dengan rumah-rumah yang rusak. Gempa ini segera meningkatkan kesadaran dan kapasitas penyelenggara negara untuk mengelola risiko bencana.

Maria Elena Orantes Lopez memberikan perspektif dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Protection Civil Camara de Diputados. Ia memulai uraian tentang sistem bikameral dalam parlemen Meksiko. Kongres adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Kongres terdiri dari dua kamar: Camara de Diputados dan Camara de Senadores. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Camara de Diputados, Maria Elena menjelaskan keanggotaan Camara de Diputados berjumlah 500 orang untuk satu

periode yang berlangsung selama tiga tahun masa jabatan. Dari 500 orang tersebut, sejumlah 300 orang dipilih secara langsung dan rahasia oleh penduduk yang memiliki hak pilih. Sementara 200 orang sisanya dipilih lewat representasi proporsional.

Dalam bagan organisasi Camara de Diputados. Pengambilan keputusan tertinggi ada di Sidang Pleno yang membawahi beberapa komisi. Menurut UU Kekuasaan Kongres Meksiko, Camara de Diputados mempunyai 56 komisi. Komisi adalah lembaga yang dibentuk melalui mekanisme sidang pleno yang membantu pemenuhan kekuasaan legal dan konstitusional Camara de Diputados melalui elaborasi pendapat, laporan, dan resolusi.

Berdasarkan kesepakatan Badan Koordinasi Politik Camara de Diputados dan Camara de Senadores diputuskan Komisi Protection Civil dibentuk di kedua kamar tersebut. Komisi Protection Civil Camara de Diputados bertugas untuk menganalisis dan menentukan usulan dan kesepakatan legislasi terkait isu penanggulangan bencana alam. Dengan adanya komisi Protection Civil di Camara de Diputados, menurut Maria Elena, parlemen dapat secara aktif berperan dan bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun system penanggulangan bencana alam.

Setelah mendengar paparan dari pihak Meksiko, delegasi GKSB DPR RI melakukan dialog berbagi *best-practice* tentang pengelolaan bencana alam. Djoko Udjiyanto, Ahmad Mustakim, Arzeti Bilbina Setyawan bagaimana kurikulum tentang kebencanaan dimasukkan dalam pendidikan sekolah-sekolah Meksiko. Bagaimana pengelolaan dana bencana untuk studi pencegahan bencana alam serta jaminan asuransi internasional.

Protection Civil menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana masuk dalam kurikulum sekolah Meksiko. Ini bagian dari pembelajaran anak-anak sekolah menghadapi bencana alam. Di sekolah, anak-anak murid diajari menghadapi bencana alam. Bagaimana cara penyelamatan diri sewaktu gempa bumi melanda atau gunung api meletus. Pembelajaran yang sering diajarkan akan tersimpan dalam benak si anak dan menjadi sikap perilaku dalam mengurangi risiko bencana alam.

Sebuah komponen penting dari upaya ini adalah pembentukan Dana Bencana Alam (FONDEN) yang, awalnya untuk membiayai rekonstruksi pasca-bencana, dan baru-baru ini, untuk membiayai semua tahap siklus *Disaster Risk Management*.

Dalam konteks penanggulangan bencana alam, Bank Dunia mendukung Pemerintah Meksiko dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko bencana yang komprehensif dengan penekanan khusus pada: mengkonsolidasikan strategi pembiayaan risiko bencana federal yang hemat biaya; memberikan pengalaman dan pelajaran di tingkat federal dalam pembiayaan risiko bencana; dan pengarusutamaan pengurangan risiko dalam penggunaan lahan dan perencanaan kota.

Hal yang patut menjadi pelajaran dari pembiayaan risiko bencana alam di Meksiko adalah bantuan dana internasional yang dikururkan oleh Bank Dunia. Dalam disaster risk management, Bank Dunia memberikan bantuan kepada Pemerintah Meksiko dalam bentuk:

1. Pembentukan pembiayaan risiko bencana dan asuransi: penciptaan Dana Bencana Alam (FONDEN) dan desain dan penerbitan instrumen transfer risiko yang inovatif seperti MultiCat Meksiko beserta skema asuransi pendanaan.
2. Memastikan bahwa semua pengetahuan dan pengalaman bermanfaat untuk Pemerintah Federal dan pemerintah daerah yang paling terkena dampak bencana.
3. Menggalakkan pengarusutamaan manajemen risiko bencana ke dalam penggunaan lahan dan perencanaan perkotaan sebagaimana tercantum dalam Kementerian Teritorial dan Pembangunan Perkotaan (SEDATU). *Disaster Risk Management* di Meksiko diarahkan ke penggunaan lahan dan perencanaan kota untuk menghindari bangunan di daerah rawan banjir, harmonisasi dan penegakan penggunaan lahan dan instrumen perencanaan kota dan ketahanan keuangan dan fiskal dari bencana alam yang merugikan.

Dalam konteks Dana Bencana Alam (FONDEN), program keterlibatan Bank Dunia difokuskan pada: (1) konsolidasi teknis pada pembiayaan risiko bencana dan

membantu pemerintah Meksiko pada pengembangan strategi hemat biaya untuk mengelola bencana terkait risiko fiskal di tingkat federal; (2) memperluas strategi pembiayaan risiko bencana dan asuransi Meksiko ke tingkat federal; dan (3) memperluas peluang untuk memperkuat integrasi kebijakan pengurangan risiko dalam perencanaan pengembangan wilayah dan perkotaan.

Dengan dukungan Bank Dunia, Meksiko bergeser dari pendekatan reaktif menanggulangi bencana menuju pendekatan manajemen risiko bencana proaktif. Ini juga dikembangkan sebagai salah satu pilar pendekatan yang komprehensif terkoordinasi untuk manajemen risiko fiskal di Meksiko dalam kemitraan dengan berbagai pihak.

### III. Penutup (menunggu masukan delegasi)

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran/ Rekomendasi